

2025



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2025

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TAPIN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Semoga dokumen Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin.

Rantau, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin,

H. SAPUANI, S. Sos., M. AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680415 199002 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH...	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	20
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD	21
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI..	24
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	25
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
V. PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan SOTK baru Tenaga Kerja Dua Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan satu Balai Latihan Kerja melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat bidang Ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas, hubungan Industrial syarat kerja. Dalam rangka mewujudkan “ **good governance** “ serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang tenaga kerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, maka disusunlah Renja Dinas Tenaga Kerja tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mengacu pada :

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2025

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05).
29. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
31. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
32. Peraturan Bupati Tapin No. 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2022-2027;
33. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai Pedoman kerja bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program Kegiatan disesuaikan antara Program Perangkat Daerah, Program Daerah, Program Provinsi dan program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan rencana kerja tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja yang merupakan tujuan Akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja
5. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder*), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Daftar Isi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Paerangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan 83,90% baik terhadap Renja maupun target dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2025. Berikut penjabaran dari program Dan kegiatan yang sudah terlaksana :

1.2.5. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini meliputi belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan serta belanja penggandaan dan penjilidan untuk penyusunan laporan-laporan antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Laporan Monitoring Evaluasi (MONEV) dan lain-lain. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 11.756.081,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 11.654.600,00 (99,14%)

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 6.864.700,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 6.860.200,00 (99,93%).

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini meliputi belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan serta belanja penggandaan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Semesteran. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 6.245.500,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 6.133.200,00 (98,20%).

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan lengkap diharapkan dapat mendukung kegiatan administrasi kantor yang baik.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 253.361.286,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 186.548.907,00 (73,63%) (sisa anggaran sebesar Rp. 66.812.379,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 73,63%, dikarenakan 26,37%nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang).

1.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini meliputi belanja bahan bangunan dan konstruksi, belanja bahan-bahan kimia, belanja alat listrik, belanja perlengkapan dinas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja pakaian dinas lapangan, belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja sewa Gedung dan bangunan dan belanja sewa bangunan terbuat.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 110.567.875,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 104.038.800,00 (94,09%) (sisa anggaran sebesar, Rp. 6.529.075,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh).

1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini diantaranya dilaksanakan untuk kegiatan cetak dan penggandaan dokumen-dokumen dinas sebagai pendukung pertanggungjawaban administrasi baik keuangan maupun administrasi lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.456.930,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 16.542.000,00 (99,63%).

1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat maupun konsultasi baik di dalam daerah maupun keluar daerah. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 943.744.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 940.247.296,00 (99,06%).

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini meliputi pembelian dinamo 35 buah, mesin survey kepuasan masyarakat 1 buah, videotron 1 buah, Komputer all in one 4 unit, printer 4 buah, tablet 2 unit, dan UPS 1 200 VA 4 unit. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 378.778.652,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 200.430.000,00 (52,91%) (sisa anggaran sebesar Rp. 178.348.652,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 52,91%, dikarenakan 47,09%nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang).

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan komunikasi dilaksanakan dalam rangka untuk kelancaran komunikasi lintas dinas baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Sedangkan penyediaan sumber daya air dan listrik untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.82.222.208,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 76.959.831 (93,60%).

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini disediakan 1 (satu) orang untuk petugas kebersihan dan 1 (satu) orang keamanan kantor. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan kantor dan aset yang ada di dalam maupun di luar kantor serta untuk menciptakan kondisi ruangan kerja dan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 82.200.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 78.600.000,00 (95,62%).

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini meliputi pembelian belanja jasa service, penggantian Suku Cadang, KIR, Perpanjangan STNK, dan BBM untuk Mobil Dinas Roda 4 sebanyak 2 buah (DA 1780 KI dan DA 1662 KJ), dan Sepeda Motor Dinas Roda 2 sebanyak 1 buah (DA 552 KF) untuk keperluan operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Pagu yang disediakan sebesar Rp.65.163.984,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 50.481.353,00 (77,47%).

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini meliputi belanja suku cadang jasa service mesin-mesin keperluan kursus/pelatihan, belanja pemeliharaan Personal Computer (PC)/notebook, belanja pemeliharaan AC, dan belanja pemeliharaan printer.

Yang tidak terealisasi adalah service mesin jahit dari BLK karena tidak ada kerusakan.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 8.660.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 6.010.000 (69,40%) (kondisi peralatan dan mesin lainnya Sebagian besar masih bagus).

1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan ruang rapat sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, rumah dinas, Gudang untuk garasi mobil box, dan belanja pemeliharaan gedung workshop pelatihan BLK Tapin dan terealisasi semua.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 2.269.227.200,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 1.604.812.090,00 (70,72%).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 70,72%, dikarenakan 29,28%nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang).

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

2.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan ini meliputi belanja barang dan jasa pakai habis dan belanja bahan praktek untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin yang terdiri dari:

1. Pelatihan Operator Komputer Muda 2 paket (32 orang) dan 2 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan tanggal 1 Maret sampai 21 Maret 2023 di Workshop BLK Disnaker Tapin dengan peserta 16 orang yang berasal dari Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara. Dan tahap kedua dilaksanakan tanggal 6 November sampai 29 November 2023 di BLKK Assuniyah Tambarangan Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang.

2. Pelatihan Pembuatan Kue 2 paket (32 orang) dan 2 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan tanggal 11 September sampai 27 September 2023 di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang. Dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai 20 Oktober 2023 di Desa Badaun Kecamatan Tapin Utara dengan peserta 16 orang.

3. Pelatihan Tata Rias 3 paket (48 orang) dan 3 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan tanggal 1 Maret sampai 21 Maret 2023 di Workshop BLK Disnaker Tapin dengan peserta 16 orang. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 21 Juni 2023 di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang. Dan tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 15 November 2023 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang

4. Pelatihan Service Sepeda Motor 3 paket (48 orang) dan 3 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai 7 Oktober 2023 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai 8 November 2023 di BLKK Assunyah Tambarangan Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang. Dan Tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 November sampai 29 November 2023 di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang.

5. Pelatihan Sasirangan 1 Paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 21 Juni 2023 di Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

6. Pelatihan Menjahit 5 paket (16 orang) dan 5 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai 31 Mei 2023 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang. Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 26 Agustus 2023 di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang. Tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 September sampai 29 September 2023 di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang. Tahap keempat dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai 21 Oktober 2023 di Desa Banua Halat Kiri dengan peserta 16 orang. Dan Tahap kelima dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 16 November 2023 di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang.

7. Pelatihan Batik Jawa 1 paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 21 Juni 2023 di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

8. Pelatihan Las 1 Paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 25 Agustus 2023 di Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 899.125.276,00 dan terealisasi sebesar Rp. 745.078.600,00 (82,87%).

2.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

2.2.1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu Sosialisasi VIN Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 19 Oktober dengan jumlah peserta sebanyak 13 LPK setiap LPK diwakili oleh 2 orang atau jumlah total 26 orang peserta. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 15.341.650,00 dan teralisasi sebesar Rp. 13.696.000 (89,27%).

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

3.1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pelayanan antar Kerja

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan peserta 36 orang, yang terdiri dari 12 orang camat se- Kabupaten Tapin, 12 orang Ketua Forum Kepala Desa se Kabupaten Tapin dan 12 orang pencari kerja yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 11.605.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.171.000,00 (87,64%).

3.1.2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali dengan waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan pertama dilaksanakan di MAN 2 Tapin, pada tanggal 20 Februari 2023 dengan jumlah peserta 40 siswa kelas XII. Kegiatan kedua dilaksanakan di Aula SMAN Salam Babaris, pada tanggal 22 Februari 2023 dengan jumlah 40 orang siswa kelas XII. Kegiatan ketiga, dilaksanakan di Mushola SMAN 1 CLS Margasari, pada tanggal 28 Februari 2023 dengan jumlah peserta 40 siswa kelas XII. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 17.555.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.103.000,00 (80,33%).

3.1.3. Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pelatihan Kecantikan, kegiatan ini meliputi belanja bahan kecantikan, honor instruktur, cetak penggandaan, spanduk, materai, makanan minuman rapat, dan jasa dokumentasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Gunung Batu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Juli - 2 Agustus 2023 sebanyak 12 orang ibu-ibu Kader Desa Gunung Batu.
2. Pelatihan dan hibah kandang ayam, bibit ayam, pakan dan pangan, terdiri dari ayam pedaging dan ayam petelur, kegiatan ini meliputi belanja cetak penggandaan, spanduk, jasa perencana desain interior, jasa arsitektur, jasa pengawasan arsitektur dan bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan di 12 desa yaitu Desa Antasari, Kelurahan Rantau Kiwa, Desa Bitahan, Desa Suato Lama, Desa Sungai Rutas, Desa Sungai Rutas Hulu, Desa Pandahan, Desa Marampiaou, Kelurahan Tambarangan, Desa Bundung Desa

- Rumintin, Desa Kambang Habang Lama, dengan jumlah peserta 12 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 10 orang.
3. Pelatihan teknis budidaya ikan, pakan ikan, bibit ikan yg terdiri dari ikan patin, gurami, dan toman, dan peralatan pendukung kolam ikan, kegiatan ini meliputi belanja jasa peralatan pendukung kolam ikan, bibit ikan dan pakannya, cetak penggandaan, spanduk, dan jasa Narasumber Instruktur. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 desa yaitu Desa Marampiau, Desa Marampiau Hilir, Desa Pariok, Desa Sawaja, dengan jumlah peserta 4 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 12 orang.
 4. Pelatihan dan bantuan usaha budidaya kambing, yaitu kandang kambing dan kambing etawa, kegiatan ini meliputi belanja jasa kandang kambing, peralatan kandang, makanan minuman rapat, cetak penggandaan, spanduk dan jasa narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 tempat di Kelurahan, dengan jumlah peserta 2 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 10 orang.
 5. Pelatihan Driver Dump Truck, kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman aktivitas lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di LPK Kalua Mandiri Kabuapten Tabalong selama 20 hari pada tanggal 20 November–10 Desember 2023 sebanyak 16 orang peserta dari pengangguran terdata di kemiskinan ekstrem di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tapin melalui sistem seleksi.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 6.053.920.463,00 dan teralisasi sebesar Rp. 5.040.994.027,00 (83,27%).

3.2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

3.2.1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan ini meliputi belanja barang dan jasa pakai habis dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pasar Kerja Online, yang memberikan pelayanan pada pendaftar pencari kerja secara online di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin secara gratis selama 1 (satu) tahun dengan target 1300 orang

pencaker yang akan terdaftar untuk mendapatkan kartu AK I, kegiatan ini dilaksanakan pada waktu jam kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan memberi kemudahan bagi pencari kerja untuk mendaftar di luar jam kerja secara online. Dengan adanya pelayanan secara online ini pencari kerja dapat mendaftar langsung untuk mencari informasi lowongan kerja dan perusahaan dalam mengumumkan formasi lowongan langsung secara online. Dari hasil pelayanan data pendaftar/pencaker tersebut dapat terekam secara langsung secara nasional. Target: 1300 orang terealisasi fisik (100%) sedangkan pencaker yang telah terdaftar di tahun 2022 sebanyak 1699 orang.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 99.245.030,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 89.492.500,00 (90,17%).

3.3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

3.3.1. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Kegiatan ini meliputi belanja cetak penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, jasa instruktur, jasa dokumentasi. Rangkaian kegiatan SSW yaitu Sosialisasi Pemagangan ke Jepang, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Gedung Pendopo Galuh Bastari Kabupaten Tapin, dengan jumlah 410 peserta yang terdiri dari siswa siswi SMAN/SMKN se Kabupaten Tapin, Dinas Tenaga Kerja se Kalimantan Selatan.

Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Tapin/Kota berupa Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Gagal dilaksanakan karena Peserta yang akan dikirim tidak memenuhi kuota yang diminta pihak Kementerian yaitu 150 Peserta Pemagangan ke

Jepang dari Kabupaten Tapin, namun pelaksanaan tersebut digantikan dengan Sosialisasi Pemagangan ke Jepang. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 466.374.496,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.458.090,00 (50,49%).

3.3.2. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia

Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS dalam rangka memfasilitasi kegiatan Tim Penanggulangan PMI non Prosedural (satgas), yang beranggotakan Polres Tapin, Kejaksaan Negeri Tapin, Kodim 1010 Rantau, Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Kantor Rantau, Kemenag Tapin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Forum Kepala Desa se Kabupaten Tapin, dan Kesbangpol, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023, kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, dan kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 19.999.684,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.986.000,00 (84,93%).

4. Program Hubungan Industrial

4.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Kegiatan ini meliputi belanja penggandaan, jasa dokumen serta administrasi kegiatan penyelesaian prosedur PP (Peraturan Perusahaan), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan. Penyelesaian Prosedur PP (Peraturan Perusahaan), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Pelaporan dan

Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan merupakan kegiatan pemeriksaan terkait berkas Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan yang diajukan oleh perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dibuatkan surat pengesahan/pencatatannya. Pemeriksaan atas PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan terkait materi yang ada didalam PP, SP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada. Berkas yang diajukan dan sudah dicatatkan juga ada sebanyak 50 (lima puluh) berkas, terdiri dari 3 berkas Peraturan Perusahaan (PP), 7 berkas LKS Bipartit, 39 berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan 1 berkas Out Sourcing. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 5.706.968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.083.150,00 (89,07%).

4.1.2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Kegiatan ini meliputi belanja materai, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, honorarium tim pelaksana kegiatan (anggota) non PNS, Jasa Dokumentasi dan seragam dalam rangka memfasilitasi kegiatan Rapat Dewan Pengupahan, Rapat Dewan Pengupahan ini dilaksanakan 2 kali pertemuan selama tahun 2023, yaitu 2 kali pertemuan di triwulan 4. Selain itu dana kegiatan ini juga di pergunakan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Tapin sebanyak 5.084 orang.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Bukan Penerima Upah yang dilaksanakan di beberapa desa, yang pertama dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Bungur pada tanggal 22 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang kedua dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Tapin Selatan yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Salam Babaris pada tanggal 26 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang ketiga dilaksanakan di Aula Kecamatan Binuang yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun pada tanggal 27 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang keempat dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Lokpaikat yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Piani pada tanggal 5 Juli 2023 dengan peserta 50 orang, yang kelima dilaksanakan di Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara pada tanggal 11 Juli 2023 dengan peserta 50 orang, dan yang keenam dilaksanakan di Aula Kecamatan Tapin Tengah yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Tengan dan Kecamatan Bakarangan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan peserta 50 orang.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 605.934.428,00 dan terealisasi sebesar Rp. 598.406.220,00 (98,76%).

4.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Sosialisasi UMP Kalimantan Selatan Tahun 2024, dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh manajemen dan karyawan-karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 5 Desember 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi SKPD/Instansi (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja yang dihadiri oleh perwakilan Dinas/Instansi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Maret 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan jumlah peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Selain itu ada pula kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Dalam Rangka Memperingati May Day/Hari Buruh Sedunia (1 Mei 2023) di Kabupaten Tapin, dilaksanakan di Gedung Workshop Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 4 April 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan.

Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 31 Mei 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, serta honor narasumber.

Terakhir adalah kegiatan pembentukan dan pemberdayaan LKS Bipartit PT. Anugerah Mitra Kalimantan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang bertempat di Grafio Koffie dengan jumlah peserta 6 orang. Kegiatan ini meliputi belanja Alat Tulis Kantor (ATK), makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, serta honor narasumber.

Dengan adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut di atas diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 83.713.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.990.600,00 (87,19%).

4.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja Jasa Pengolahan Data (Honorar tingkat S1 3 Orang dan tingkat SMA 1 orang) selama 1 tahun. Dan belanja cetak penggandaan, makanan dan minuman untuk memfasilitasi dokumen kegiatan dan administrasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja.

Kasus konflik/perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang masuk/dilaporkan selama tahun 2023 ada sebanyak 12 kasus dan kesemuanya telah dilakukan usaha perundingan untuk mencari pemecahan masalah dan 11 kasus tersebut diselesaikan secara Perjanjian Bersama ditingkat Perusahaan atau melalui Perundingan Bipartit, 1 Kasus dilakukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin karena tidak ada kesepakatan maka kasus tersebut diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 81.671.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.690.000,00 (89,00%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut ini adalah tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Secara umum target kinerja dari 5 indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah $>100\%$ yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Baik”**.

**Tabel .1.
Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi Tahunan (%)	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50%	70,17%	99,53%
2.	Meningkatnya Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	70%	71%	101%
3.	Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	85%	85,83%	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78	72	92,30%
5.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	75	58,9	78,53%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu :

1. Peningkatan paket pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
2. Penambahan SDM tenaga teknis dan tenaga administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin (kuantitas dan kualitas).
3. Penambahan Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan administrasi dan pelatihan.
4. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial antara pekerja dan pengusaha.
5. Peningkatan penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai ketenagakerjaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja antara lain:

1. Penanganan masalah perluasan kesempatan kerja, dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan dan melaksanakan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tenaga kerja ke luar negeri.
2. Penanganan masalah penempatan tenaga kerja dan Kesempatan Kerja, melalui sub kegiatan :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/kota
 - Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 - Penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran (CPMI)
3. Penanganan masalah lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat kerja dengan melakukan kegiatan Pembinaan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Penanganan masalah norma kerja, kesejahteraan, pekerja dan purna kerja, dengan melakukan kegiatan pembinaan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
5. Penanganan masalah Kesehatan keselamatan kerja dan Jamsostek, dengan melakukan kegiatan pembinaan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Disamping itu terdapat juga Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis dinas, antara lain :

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2. Pemeliharaan Rutin/Bekala Sarana dan Prasarana BLK Tapin.

Tantangan dan Peluang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

a. Tantangan

1. Masih tingginya tingkat pengangguran yang tidak mempunyai keterampilan.
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga memaksa pekerja memilih pekerjaan yang beresiko dengan imbalan yang rendah.
3. Terbatasnya lowongan pekerjaan sehingga proses Bursa Kerja sangat terhambat.
4. Terbatasnya Dana yang tersedia dibidang pelatihan, sehingga kegiatan Pelatihan Kerja sangat terbatas.
5. Keteringgalan teknologi dan perangkat pelatihan keterampilan dalam menghadapi kemajuan teknologi.
6. Kurangnya Tenaga Instruktur karna sebagian sudah memasuki masa Purna tugas.
7. Banyaknya Pengangguran Terbuka sehingga memerlukan Pelatihan Untuk Terjun Kedunia Kerja.
8. Masih rendahnya Kesejahteraan Pekerja/Buruh,
9. Tidak adanya Mediator Hubungan
10. Masih banyaknya perselisihan buruh dan pengusaha.
11. Belum maksimalnya Peranan Lembaga Ketenagakerjaan secara Bipartit, Tripartit.
12. Masih rendahnya kesadaran bagi pekerja Informal untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
13. Kurangnya pembinaan atau pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan.
14. Kurangnya SDM yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

b. Peluang

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Dukungan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (APBN)
3. Koordinasi yang baik dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
4. Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.

Berdasarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menentukan beberapa pelayanan yang akan diberikan untuk periode 2024-2026 difokuskan pada :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja BLK Tapin (meningkatkan ketrampilan tenaga kerja serta meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja).
2. Meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi mengenai penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, nasional dan internasional.
4. Menjaga keseimbangan kesempatan kerja/pemenuhan tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia antara penduduk lokal dan penduduk pendatang di Kabupaten Tapin, dalam jangka panjang untuk menghindari terjadinya masalah sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
6. Meningkatkan akses/kemudahan peserta pelatihan yang berlokasi yang jauh melalui pelatihan MTU (Mobile Training Unit).
7. Dukungan Kepala Daerah dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2.4. Review Terhadap RKPD

Pada RKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2025 terdapat prioritas Rencana Kerja yaitu :

1. Pelayanan Urusan Administrasi Perkantoran

Terkait dengan kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023, diantaranya :

1. Belum adanya mobil operasional perusahaan-perusahaan.
2. Kurangnya tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
3. Kurang memadainya Sarana dan prasarana Pelatihan

2. Pelayanan Urusan Tenaga Kerja

Terkait dengan masalah urusan di Bidang Pelayanan urusan Tenaga Kerja, Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2023 diantaranya :

1. Dalam penanganan penempatan dan perluasan kesempatan kerja masih belum adanya sinergitas lintas sektoral.
2. Masih rendahnya tingkat produktivitas masyarakat/pencari kerja yang ada.
3. Belum adanya forum koordinasi yang integratif/forum jejaring antar lembaga swasta dalam melaksanakan kebijakan peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Masih adanya permasalahan hubungan industrial yang kurang harmonis antara pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
5. Rendahnya Tingkat Pendidikan yang terdaftar sebagai pencari kerja Non Skill sehingga perlunya pembinaan bagi Tenaga Kerja.
6. Terbatasnya peralatan yang canggih sesuai dengan teknologi yang maju untuk pelatihan yang ada di BLK Kabupaten Tapin.
7. Masih banyaknya permasalahan antara pekerja dengan perusahaan.

8. Minimnya kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat melalui sektor formal maupun informal.
9. Semakin meningkatnya pengangguran yang tidak mempunyai ketrampilan.
10. Terbatasnya informasi dan data yang valid dan akurat perusahaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
11. Belum terbentuknya perlindungan dan pemberdayaan Ketenagakerjaan seperti pembentukan Asosiasi Pengusaha, Pekerja, Bipartit dan Tripartit.
12. Masih ada perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek.

Dari aspek prioritas di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai salah satu unit ini pelaksana Otonomi Daerah di Kabupaten Tapin dalam bidang ini melaksanakan prioritas kegiatan dari **Aspek Tenaga Kerja** yang mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dapat berperan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang Ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, Pelatihan dan Produktivitas serta Hubungan Industrial syarat-syarat kerja.

Adapun Tabel Review terhadap RKPD tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial syarat kerja.

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin selama tahun 2025 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara, maka dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu (a) penguatan perencanaan tenaga kerja nasional; (b) percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja; (c) percepatan sertifikasi profesi; (d) perluasan kesempatan kerja formal; (e) penguatan wirausaha produktif; (f) penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif; (g) penegakan hukum ketenagakerjaan; (h) peningkatan perlindungan pekerja migran; (i) pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan akuntabel.

Permasalahan utama ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kalsel adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan:

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja,
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi,
3. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja,
4. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai,
5. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.
6. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan mengakibatkan rendahnya daya saing dan kekuatan tawar di pasar kerja.

Berikut adalah Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada bidang ketenagakerjaan yaitu:

1. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja program : - Jumlah perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja program : - Persentase pencari kerja yang memperoleh sertifikasi kompetensi;
3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja program: - Persentase penduduk yang bekerja.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja Berkualitas bagi Masyarakat
2. Terwujudnya seluruh usaha yang menerapkan pembayaran sesuai UMR

3.2.2 Cascading Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Adapun Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin beserta indicator kinerjanya dapat dilihat pada table 3.2.1 dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rancangan Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

TUJUAN / SASARAN DAERAH / SKPD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH / SKPD	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		
			2021	2022	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen %	3,60	3,60	3,43	3,34	3,25
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen %	4,96	4,15	3,95	3,85	3,75
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen (%)	70,69	70,79	70,95	71,11	71,11
Meningkatnya Pencari kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	Persen (%)	64	64,5	67	68	70
Meningkatnya Penerapan Tata kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen %	68,18	70	71%	72%	73%
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata kerja kelola Pemerintah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	53,94	55,00	58,18	59,59	61,00
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Angka	68,93	70,72	71,61	72,50	72,50
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal	Angka	76,25	82	84	86	86
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Angka	-	-	65	70	75

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosinya dapat dilihat pada **Tabel Matriks** dibawah ini.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. TAPIN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						15.021.928.146,00						25.968.265.653,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.021.928.146,00							25.968.265.653,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						15.021.928.146,00							25.968.265.653,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%</i>	100 %			100 %	11.608.086.802,00						100 %	12.257.565.653,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:Persen) Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen) Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:Persen)</i>	95 % 0 % 95 %			95 % 90 % 90 %	25.522.350,00			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-	100 % 95 % 95 %	47.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.905.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.905.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				16 Laporan	11.712.350,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		12.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti Disnaker (Dengan Satuan:Persen) Persentase laporan keuangan Disnaker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen) Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Persen)</i>	95 % 90 % 100 %			100 % 90 % 95 %	3.380.494.080,00			-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	95 % 90 % 100 %	3.512.765.653,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/bulan	3.374.229.080,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		3.500.765.653,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	6.265.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (Dengan Satuan:Persen)</i>	57 %			38 %	147.938.960,00			-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	57 %	155.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	112.938.960,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat Disnaker (Dengan Satuan:Persen)</i>	4 %			4 %	1.481.882.660,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	4 %	3.498.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	82.341.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	152.858.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12.669.100,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				8 Laporan	11.330.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				185 Laporan	964.840.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				6 Dokumen	197.843.160,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Disnaker dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</i>	100 %			99 %	987.920.600,00			-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	100 %	2.820.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	763.740.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		2.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				42 Unit	224.180.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		520.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Nilai Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan:Persen)</i>	100 %			100 %	337.071.850,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	100 %	324.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	110.271.850,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		174.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	226.800.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Disnaker dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)</i>	90 %			90 %	5.247.256.302,00			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-	90 %	1.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	46.490.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				40 Unit	20.765.702,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5.180.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang berkualitas dan berkompentensi</i>	94% %			94% %	1.939.109.699,00						94% %	5.021.800.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)</i>	95 %			94 %	1.929.923.699,00			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-	95 %	4.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				160 Orang	1.073.264.879,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		2.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				2 Lembaga	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				15 Unit	856.658.820,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Dengan Satuan:Persen)</i>	100 %			100 %	9.186.000,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	100 %	37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>				12 Lembaga	9.186.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Persentase meningkatnya pelayanan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Dengan Satuan:Persen)</i>	26 %			23 %	0,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	26 %	84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>				26 Perizinan	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Tenaga Kerja yang Di tempatkan</i>	70,95% %			70,95% %	917.666.895,00						70,95% %	7.340.700.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya pelayanan, penyuluhan, bimbingan dan pelatihan bagi tenaga kerja di Daerah Kabupten (Dengan Satuan:Persen)</i>	95 %			93 %	606.533.810,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	95 %	3.740.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				30 Orang	14.944.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		44.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				50 Orang	15.431.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		46.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>				15 Orang	55.631.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				108 Orang	520.527.810,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		2.900.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Informasi Pasar Kerja (Dengan Satuan:Persen)</i>	100 %			100 %	163.501.885,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	100 %	1.750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				1456 Orang	115.762.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				75 Orang	47.739.085,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Potensi Penyerapan Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Persen)</i>	70 %			60 %	147.631.200,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	65 %	1.850.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				46 Orang	113.017.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		1.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			<i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i>				30 Orang	34.613.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		50.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan</i>	23% %			23% %	557.064.750,00						23% %	1.348.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kerja yang layak (Dengan Satuan:Persen)</i>	73 %			72 %	53.521.500,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	73 %	245.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				96 Perusahaan	16.108.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				92 Laporan	37.413.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perselisihan Kasus yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)</i>	90 %			87 %	503.543.250,00			-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-	90 %	1.103.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				0 Perkara	213.604.350,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		235.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				5 Perkara	77.540.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantauan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja	-		168.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				6000 Orang	212.398.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n keterampi lan dan keahlian Angkatan kerja	-		700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
J U M L A H								15.021.928.146,00							25.968.265.653,00	

Rantau, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tapin,

H. SAPUANI, S. Sos., M. AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680415 199002 2 003

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyarakatkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas tenaga kerja Kabupaten Tapin kerja ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.

Pj. BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd